

DAFTAR PUSTAKA

Buku

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983, hal.30

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), Hal. 13

Lumban Tobing G.H.S., 1999, *Peraturan jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, hlm.12

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,

hlm. 226

Rachmat Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, hlm.69

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal.9

Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)Hal,9.

Soerjono Soekanto. 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Hal.8

Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)Hal 110.

Sri Utami, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan*

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”,
artikel pada jurnal *Repertorium* ISSN: 2355-2646, Edisi 3 Januari-juni 2015,

hlm.89.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,
1981), Hal.110

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta:
Liberty, 1998), hal.25

Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, *Sekilas Tinjauan Akta*

Menurut Hukum, (Desember 1995), hal.128

Suharjono, *op. Cit*, hal.43

Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-Undang*, No, 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), Mkn USU, 2007, Hal

9-10

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar*

Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990,

Hal.618.

Wawan Setiawan, 1998, *Kedudukan dan keberadaan serta Fungsi dan Peranan*

Notaris Sebagai Pejabat Umum Menurut Sistem Hukum di Indonesia,

Bandung Alumni, hlm 27

Jurnal

Dwikky Bagus Wibisono, “Peranan Majelis Pengawas terhadap Pengawasan
Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal”. Vol 5 No 1 Maret 2018

Sri Yuniati, “*Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*”. Vol. 4 No. 4 Desember 2017

Yogi Priyambodo, “*Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga*”. Vol. 4 No. 3 September 2017

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris